

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA JABATAN
(SUATU PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SIDIQ FIOI RAHARJO

NIM: 10300113035

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sidiq Fiqi Raharjo
NIM : 10300113035
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/28 Mei 1992
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : BTN Gowa Saran Indah
Judul : Kejahatan yang Dilakukan dalam Masa Jabatan (Suatu Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa, 7 Desember 2017

Penyusun,



SIDIQ FIOI RAHARJO
NIM: 10300113035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Masa Jabatan (suatu perspektif hukum nasional dan hukum islam)*", yang disusun oleh *Sidiq Fiqi Raharjo*, NIM: 10300113035, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 M, bertepatan dengan 23 Rabi'ul Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 11 Desember 2017 M.
23 Rabi'ul Awal 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sohrab, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Abd Rahman Kanang M.Pd, Ph.D	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penyusun dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

Sepantasnya persembahkan puji syukur hanya di peruntukan kepada Sang Maha Mendengar dan Maha Melihat, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Kejahatan yang dilakukan dalam Masa Jabatan (Suatu Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam).”

Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup, yang telah mengantarkan dari dunia kebodohan menuju ke dunia kepintaran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini, dan kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, H. Aris Sumartono dan Hj. Tasmin Ekawati, semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penulis semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu peroleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbbari, M. Ag selaku Rektor UIN Alauddin. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama penyusun mengikuti pendidikan.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin.
3. Dr. Sohrah D. Ag dan Abd Rahman Kanang M. Pd., Ph. D selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Nila Sastrawaty, M.Si selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Dr. Kurniati.,S.Ag.,M.Hi, selaku sekretaris jurusan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi saran dan masukan kepada penyusun.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
6. Kak Canci dan Caca selaku staf jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang senantiasa sabar dalam membantu penyusun dalam hal administrasi.
7. Ucapan terima kasih yang sangat special kepada saudari Wahyuni Hamka S.H yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam membuat skripsi ini, serta kepada Kakanda Sukirno S.Hi yang senantiasa mengarahkan dalam pembuatan skrispsi ini juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di HPK A 2013, yang telah banyak memberikan inspirasi dan masukan kepada

penulis, kenangan bersama kalian akan selalu terkenang, serta kepada teman-temanku yang tak bisa kusebutkan satu persatu.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penyusun usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologinya, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Demikian semoga apa yang disusun dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh.,,Amien

Samata-Gowa, 7 Desember 2017

Penyusun,

SIDIO FIQI RAHARJO

NIM: 10300113035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NASIONAL	 15-30
A. Pengertian Kejahatan	15
B. Pengertian Jabatan	20
C. Jenis-Jenis Kejahatan Jabatan.....	25
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN HUKUM ISLAM	 31-40
A. Pengertian Kejahatan dalam Islam	31
B. Kejahatan Jabatan dalam Islam.....	36
 BAB IV KETENTUAN MENGENAI KEJAHATAN JABATAN SEORANG PEJABAT MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM.....	 41-63
A. Ketentuan Perspektif Hukum Nasional mengenai Kejahatan yang dilakukan Dalam Masa Jabatan.....	41
B. Ketentuan Perspektif Hukum Islam mengenai Kejahatan yang dilakukan Dalam Masa Jabatan	59
 BAB V PENUTUP.....	 64-66
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian	65
 DAFTAR PUSTAKA	 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yaa’</i>	Ai	a dani
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	A dan garis di atas
إ	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. Taa' marbuutah

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan *ha [h]*.

Contoh :

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfal*
 الْقَاصِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*
 نَجَّيْنَا : *najjainaa*
 الْحَقُّ : *al- haqq*
 نَعَمْ : *nu"ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنَالله *diinullah* بِالله *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillaah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

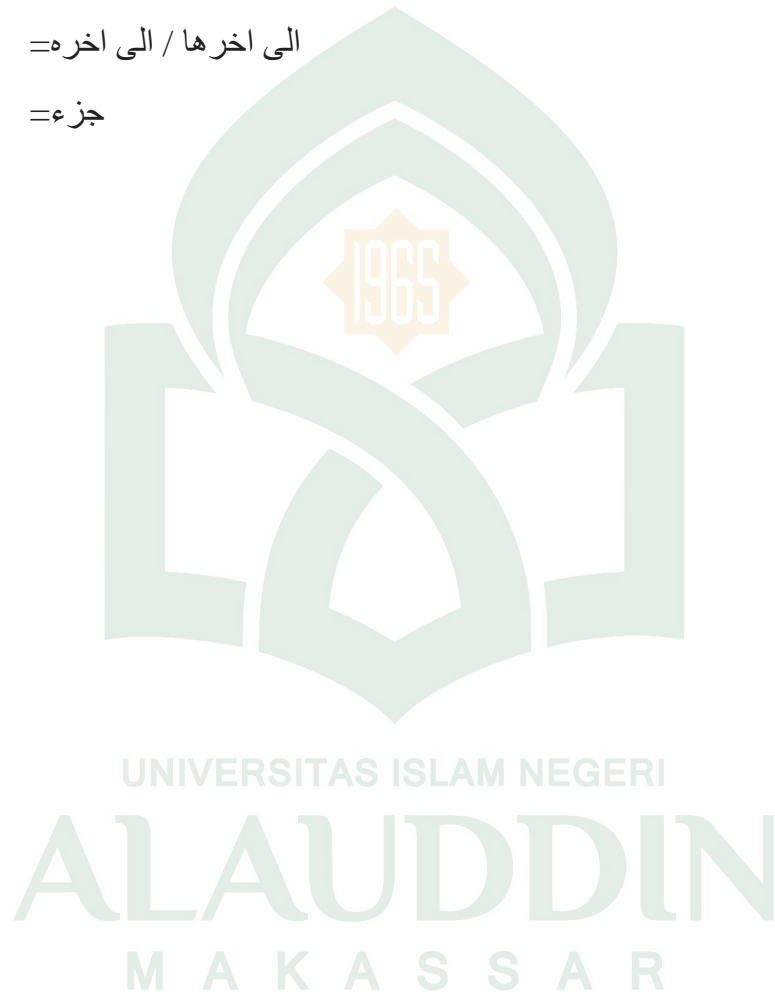
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :

ص = صفحة

دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها / الى اخره
ج	= جزء



ABSTRAK

Nama : Sidiq Fiqi Raharjo
Nim : 10300113035
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Kejahatan yang Dilakukan dalam Masa Jabatan Suatu Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Skripsi ini membahas tentang persoalan kejahatan yang dilakukan dalam masa jabatan, dengan sub permasalahan yaitu: 1) Bagaimana ketentuan Hukum Nasional mengenai kejahatan dalam masa jabatan?, 2) Bagaimana ketentuan Hukum Islam mengenai kejahatan dalam masa jabatan?. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan dalam masa jabatan suatu perspektif hukum Nasional, dan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan dalam masa jabatan suatu perspektif hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan teologis normatif (*syar'i*). Penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder. Penulis menggunakan pengolahan berupa identifikasi data, dan editing data. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Nasional, kejahatan yang dilakukan dalam masa jabatan diatur dalam KUHP Pidana, Bab XXVIII–Pasal 413-435 KUHP, sedangkan dari Hukum Islam, dijelaskan dalam Q.S Ali Imran/3:161 kata *al-ghulul* ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi, pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dipahami bahwa pengertian dari ayat tersebut adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”. Namun, dalam wilayah perkembangan kajian fiqh (Islam), khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer, istilah ini didefinisikan setara dengan korupsi.

Implikasi dari penelitian ini adalah penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap jalannya pembangunan bangsa dan Negara, baik dalam lapangan materil maupun yang bersifat moril. Gratifikasi yang dianggap suap, sebagaimana korupsi pada umumnya, dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang dari para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemberian gratifikasi sendiri telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat legal, maupun yang ilegal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka proses penyelenggaraan Negara dibutuhkan adanya suatu institusi pemerintah yang menjalankan suatu birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem kerja yang dijalankan secara sistematis dalam suatu jenjang hierarkis dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah atau sebaliknya. Pada masing-masing tingkatan melekat tugas kewajiban untuk mencapai tujuan institusi antara lain kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan. Dalam institusi pemerintah terdapat instrument-instrumen yang biasa digunakan untuk mencapai tujuan institusi tersebut, salah satunya instrument aparatur pemerintah atau personil atau kepegawaian.¹

Kedudukan aparatur pemerintah atau pegawai negeri sebagai personifikasi pemerintah, dalam kehidupan bangsa dan Negara pada saat ini dipandang mempunyai posisi yang penting dan kompleks. Posisi pegawai negeri dipandang penting oleh karena kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah sedangkan posisi pegawai negeri dipandang kompleks oleh karena kedudukan atau jabatan atau bahkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri terkadang menempatkan pegawai negeri itu sendiri di bawah godaan atau bahaya-bahaya kejahatan jabatan yang dapat memperlemah peranannya sebagai pelayan publik. Belum lagi adanya masalah konflik kepentingan

¹Yopie Morya Immanuel Patirol, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil* (Cet. I; Bandung: CV Keni Media, 2013), h. 1.

internal di lingkungan pegawai negeri itu sendiri. Yang jelas posisi kompleks ini akan selalu mengancam dan membahayakan pegawai negeri itu sendiri setiap saat.²

Dalam mengukur penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan secara factual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan membawa implikasi kewenangan atau kekuasaan pemerintah, tidak semata sebagai wewenang terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas.³

Kejahatan jabatan merupakan perbuatan tercela dan mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap jalannya pembangunan bangsa dan negara baik dari sisi moral maupun materil. Namun penindakan terhadap pelaku kejahatan jabatan haruslah berdasarkan prinsip legalitas sebagai salah satu prinsip yang dimiliki oleh negara hukum. Penindakan tersebut haruslah dapat di pertanggungjawabkan dari segi hukum dan jangan sampai penindakan terhadap pelaku kejahatan jabatan hanya berdasarkan sentimen kepentingan golongan tertentu atau hanya didasarkan pada indikasi saja. Sejalan dengan hal tersebut setiap aparatur pemerintah/pegawai negeri dibutuhkan

²Yopie Morya Immanuel Patirol, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil*, h. 1.

³Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 35-36.

kesadaran dan pemahamannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan perintah jabatan yang dimiliki untuk melayani publik.⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tidak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.⁵

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan dan pelanggaran dimana buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan dan buku III KUHP. mengatur tentang pelanggaran. Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni *pandangan pertama* yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdeliten*⁶, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*⁷, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

⁴Yopie Morya Immanuel Patirol, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil*, h. 1-2.

⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Ed. 2; Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

⁶Tim Redaksi, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Permata Press, 2009), h. 433.

⁷Tim Redaksi, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, h. 299.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wets deliktern*⁸, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. *Pandangan kedua* yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Berbicara pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan/kedudukan dalam statusnya sebagai pegawai negeri. Status sebagai pegawai negeri merupakan hal yang mutlak untuk dapat mengkategorikan suatu pelanggaran itu sebagai pelanggaran jabatan. Dalam KUHP pelanggaran Jabatan diatur dalam Bab VIII Pasal 552 sampai dengan Pasal 559 yang digolongkan sebagai pelanggaran dan diancam dengan hukuman penjara. Pelanggaran jabatan merupakan delik undang-undang demi kesejahteraan umum tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut pembentuk Undang-Undang disebut dengan kejahatan jabatan hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat khusus. Selanjutnya menurut pandangan pembentuk undang-undang, kejahatan jabatan dapat ditujukan kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum merupakan kepentingan hukum dari masyarakat maupun kepentingan hukum dari individu-individu. Suatu ciri yang bersifat umum dari kejahatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari negara.

Namun bagi umat Islam sendiri, apa makna kepemimpinan ditinjau dari sudut syariat? Kepemimpinan adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah swt. Nikmat

⁸Tim Redaksi, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, h. 452.

itu hendaklah dipandang sebagai suatu amanat atau titipan dari Allah swt kepada kita.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁹

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah yang menyuruh manusia untuk memelihara amanah. Secara garis besar amanah tersebut terbagi menjadi dua. *Pertama*, amanah dari Allah swt., termasuk di dalamnya amanah dari Rasul-Nya. *Kedua*, amanah dari manusia. Adapun pokok amanah dari Allah swt. Adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan di atas pundak manusia, baik sifatnya yang pribadi maupun yang bersifat umum. Amanah ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sementara itu, amanah dari manusia meliputi segala bidang kehidupan, dari masalah yang sekecil-kecilnya hingga ke persoalan yang sebesar-sebesarnya dalam hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan¹⁰.

Amanat adalah suatu kewajiban yang harus di tunaikan, baik kepada Allah swt atau terhadap manusia. Orang yang tidak menunaikan amanat berarti ia khianat. Setiap orang yang beriman telah membaca dua kalimat syahadat, dengan

⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 113.

¹⁰Ahmad Rofi' Usman, *Islamic Golden Stories, Para Pemimpin yang Menjaga Amanah*, (Bandung: Mizan Media), h. xvii.

mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut berarti kita telah berjanji bahwa kita bersedia taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya, maka kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya, dan kita wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Allah swt memerintahkan kepada agar memenuhi janji atau menunaikan amanat, dan melarang berkhianat. Firman Allah swt dalam Q.S Al Ahzab 33/72, yaitu :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan sangat bodoh.”¹¹

Pada ayat tersebut di sebutkan bahwa langit, bumi dan gunung-gunung tidak berani memikul amanat, dan manusialah yang sanggup memikul amanat, maka pada akhir ayat dijelaskan manusia itu amat zhalim dan amat bodoh. Maksudnya, manusia yang tidak menunaikan amanat atau berbuat khianat adalah sangat zhalim dan sangat bodoh.¹²

Jabatan adalah amanah. Salah satu arti amanah, menurut Rasulullah saw., adalah kemampuan atau keahlian dalam jabatan yang akan di pangku. Amanah akan terabaikan dan kehancuran akan tiba, manakala jabatan diserahkan kepada yang tidak mampu (melaksanakannya). Dalam kaitannya dengan jabatan itu sendiri, seorang sahabat bernama Abu Dzar pernah dinasihati Rasulullah saw., “Wahai Abu Dzar! Aku

¹¹Kementerian Agama, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, h. 604.

¹²Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, *Himpunan 69 Materi Kultum Untuk Semua Momentum* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2012), h. 129.

melihat engkau lemah. Aku (lebih) suka untuk (aku pesankan) kepadamu suatu (pesan) yang menurutku tepat (untukmu). Karena itu, jangan memimpin (walau hanya) dua orang (yang engkau pimpin) dan jangan pula (engkau) menjadi wali bagi harta anak yatim.¹³”

Penjelasan singkat tentang pemimpin atau orang yang mengemban jabatan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa menjadi seorang pemimpin atau pejabat tidaklah mudah, bahkan pemimpin adalah amanat terbesar yang berikan Allah swt pada hambanya. Terlebih lagi para pejabat yang harus mampu berbuat adil dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya, mereka harus benar-benar melayani dengan sepenuh hati karena masyarakat juga adalah amanat dari Allah swt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah adalah “Bagaimana pandangan Hukum Islam dan ketentuan KUHP terhadap kejahatan jabatan seorang pejabat?” Adapun sub masalah yang dapat diuraikan dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Nasional mengenai kejahatan dalam masa jabatan?
2. Bagaimana ketentuan Hukum Islam mengenai kejahatan dalam masa jabatan?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variable yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang di maksud adalah sebagai berikut:

¹³Ahmad Rofi' Usman, *Islamic Golden Stories, para pemimpin yang menjaga amanah*. h. xix.

- a. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹⁴
- b. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.¹⁵
- c. Hukum Nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara.
- d. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).¹⁶
- e. Adapun operasional, pengertian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah kejahatan jabatan seorang pejabat berdasarkan ketentuan kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Untuk draft yang berjudul “Kejahatan yang Dilakukan Dalam Masa Jabatan (suatu perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)”, dari hasil penelusuran yang

¹⁴Yopie Morya Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, h. 76.

¹⁵ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, h. 64-65.

¹⁶ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet : I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53

telah dilakukan, ditentukan beberapa buku yang dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini dan sesuai dengan teori-teori yang dikategorikan perlu untuk memperkuat wacana dominan dalam skripsi ini. Adapun buku-buku tersebut adalah:

1. Victor M. Situmorang, dalam bukunya, tindak pidana pegawai negeri sipil bahwa ada beberapa bentuk kejahatan dalam jabatan antara lain, penggelapan uang atau surat berharga, pengacauan administrasi, penggelapan surat-surat, menerima suap dan pemerasan. Namun dalam buku ini lebih membahas bentuk-bentuk kejahatan pegawai negeri sipil.
2. Yopie Morya Immanuel Patirol, dalam bukunya, antara perintah jabatan dan kejahatan jabatan pegawai negeri sipil, membahas tentang kejahatan jabatan menurut undang-undang hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Namun dalam buku ini lebih menekankan kepada kejahatan jabatan yang diatur oleh undang-undang.
3. Ahmad Rofi' Usman, dalam bukunya, para pemimpin yang menjaga amanah, membahas tentang jabatan adalah sebuah amanah yang harus di jalankan oleh setiap orang yang memiliki jabatan. Namun dalam buku ini lebih banyak membahas tentang sejarah pemimpin muslim yang amanah pada jabatannya.
4. Abdul Manan bin H. Muhammad Sobari, dalam bukunya, himpunan 69 materi kultum untuk semua momentum, membahas tentang ayat-ayat yang bersangkutan paut oleh amanah. Namun dalam buku ini tidak membahas secara spesifik tentang suatu jabatan yang diemban.
5. O.C Kaligis, dalam bukunya, kejahatan jabatan dalam sistem peradilan terpadu, membahas tentang dasar hukum dan praktik kejahatan jabatan di

Indonesia. Namun dalam buku ini hanya membahas tentang wewenang suatu jabatan pada instansi tertentu.

6. Amrullah Ahmad dkk, dalam bukunya dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional, membahas tentang sejarah perkembangan Hukum Islam yang di terapkan dalam sistem hukum nasional, namun di dalam buku ini tidak membahas secara spesifik kejahatan jabatan berdasarkan hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, adalah berupaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Langkah-langkah penelitian kepustakaan meliputi :

- a. Memilih ide umum mengenai topik penelitian,
- b. Mencari informasi yang mendukung topik,
- c. Pertegas fokus penelitian,
- d. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan mengklasifikasi bahan bacaan,
- e. Membaca dan membuat catatan penelitian,
- f. Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan,
- g. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet I; Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- b. Pendekatan teologis normatif (*syar'i*), yaitu memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁸

3. Sumber Data

Penulisan skripsi menggunakan sumber data kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan hanya menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder, penjelasannya yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh langsung dan menjadi rujukan sebagai sumber pertama yaitu buku yang berkaitan dengan topik penelitian,
- b. Bahan hukum sekunder, adalah antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

¹⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 28.

sebagainya.¹⁹ Dan untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: berupa Undang-Undang, yaitu : norma atau kaedah dasar yaitu:
 - a) Al-Qur'an dan Hadits
 - b) Undang-Undang Dasar 1945,
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - f) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- 3) Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedi.²⁰

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 31-32.

Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder.
- 2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kejahatan yang Dilakukan Dalam Masa Jabatan suatu perspektif Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui Kejahatan yang Dilakukan Dalam Masa Jabatan suatu perspektif Hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum islam khususnya,

sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum islam dan hukum nasional, mengenai kejahatan dalam masa jabatan.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Diharapkan dapat mengetahui Kejahatan yang Dilakukan Dalam Masa Jabatan suatu perspektif Hukum Nasional.
- b. Diharapkan dapat mengetahui Kejahatan yang Dilakukan Dalam Masa Jabatan suatu perspektif Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NASIONAL

A. Pengertian Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.¹

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat: Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandangan hukum bukan kejahatan.²

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).

¹A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 15.

²A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 15.

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Motif Pelakunya. Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
 - b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dan lain-lain.
 - d. Kejahatan lain-lain (*miscellaneous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.⁴
2. Berdasarkan Berat atau Ringan Ancaman Pidananya, yaitu:
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan

³A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 16-17.

⁴A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 19.

ini dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.⁵
3. Kepentingan Statistik.
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.⁶
 4. Kepentingan Pembentukan Teori.

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

⁵A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 19.

⁶A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 20.

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
 - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan pelacuran.
 - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.⁷
5. Ahli-ahli Sosiologi.
- a. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh, pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*) pemerkosaan (*rape*), dan lain-lain.
 - b. Occasional property crime (*kejahatan harta benda karena kesempatan*). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar (*shoplifting*), dan lain-lain.
 - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: *white collar crime* (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.
 - d. *Political crime* (kejahatan polititk). Contoh, *treason* (pemberontakan), espionage (*spionase*), sabotage (*sabotase*), *guerilla warfare* (perang gerilya), dan lain-lain.
 - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimless crimes*): Contoh pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).

⁷A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 20.

- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh: perampokan (*robbery*), penggarongan (*burglary*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*women trafficking*), perdagangan obat bius, dan lain-lain.
- h. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contoh: pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*), dan lain-lain.⁸

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.⁹

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di

⁸A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, h. 20-21.

⁹Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Cet. I; Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 28.

luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

B. Pengertian Jabatan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai definisi perintah jabatan sebaiknya mengetahui definisi jabatan dan pejabat terlebih dahulu. Beberapa definisi jabatan menurut para pakar Hukum Administrasi Negara, yaitu:

1. I Gede Astawa:

Memberikan pengertian jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.¹¹

2. E. Utrecht:

Jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*person*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahan lagi bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik diluar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi.¹²

3. W. Riawan Tjandra:

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, h. 29.

¹¹I Gde Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 19.

¹²E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: bahan Ajaran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran, 1960), h. 144.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri dalam suatu organisasi Negara.¹³

Lingkup jabatan dalam organisasi Negara dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Jabatan alat kelengkapan Negara (lazim dikenal dengan sebutan jabatan Negara) dan jabatan penyelenggara administrasi negara,
- b. Jabatan politik dan bukan jabatan politik,
- c. Jabatan yang secara langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan jabatan yang tidak langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik,
- d. Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan jabatan yang tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.¹⁴

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah jabatan karir. Yang dimaksud dengan jabatan karir yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai negeri yang telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil.

Jabatan karir di lingkungan pemerintahan terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi misalnya kepala dinas, kepala biro. Maka dengan demikian jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
2. Jabatan fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dilihat dari sudut fungsinya, sangat diperlukan

¹³W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), h. 160.

¹⁴I Gde Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah*, h. 120.

dalam organisasi, misalnya dokter, peneliti, pustakawan. Dengan demikian jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian atau keterampilan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.¹⁵

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jabatan yaitu suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Oleh karena jabatan merupakan fiksi atau abstraksi yang oleh hukum diangkat menjadi realita hukum yang merupakan personifikasi yang diciptakan oleh hukum.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Tegasnya, Pegawai Negeri merupakan sumber daya manusia pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara yang tugasnya berkecimpung dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Lebih lanjut dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri atas (1) Pegawai Negeri Sipil; (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (3) Anggota

¹⁵Yopie Morya Immanuel Patirol, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil* (Cet. I; Bandung: CV Keni Media, 2013), h. 64.

¹⁶Yopie Morya Immanuel Patirol, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil*, h. 64-65.

¹⁷Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2007), h. 1.

Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.¹⁸

Dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. PNS sebagai unsur Aparatur Pemerintah dituntut harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan penuh ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

PNS sebagai Aparatur Pemerintahan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan tugas yang diembannya tersebut maka setiap PNS mempunyai kewajiban untuk (1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintahan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI; (2) mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; (3) menyimpan rahasia jabatan; (4) mengangkat sumpah/janji PNS; (5) mengangkat sumpah/janji jabatan negeri; (6) mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.²⁰

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka PNS dipandang perlu diberikan pemahaman tentang Hukum Administrasi Negara,

¹⁸Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, h. 1.

¹⁹Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, h. 1-2.

²⁰Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, h. 2.

karena Hukum Administrasi Negara akan memberikan batasan kewenangan, proses dan prosedur yang boleh dilakukan oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta memberikan acuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga Negara, Hukum Administrasi Negara juga memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara apabila dirugikan oleh Pejabat Administrasi Negara sebagai akibat keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan.²¹

PNS sebagai aparatur pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai pelayan masyarakat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh terlepas dari hukum, karena Hukum Administrasi Negara telah memberikan batasan kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil atau disebut juga sebagai Pejabat Administrasi Negara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh karena itu apabila PNS di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka akan muncul gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dari pihak-pihak atau masyarakat yang dirugikan sebagai akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan atau diputuskan. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²²

Tugas PNS adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu PNS selalu menjadi obyek pengawasan di dalam melaksanakan tugas dan

²¹Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, h. 2.

²²Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, h. 3.

fungsinya, oleh karena itu agar PNS di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak selalu menjadi obyek pengawasan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan demikian maka akan terwujud pemerintahan yang baik atau *good governance*.²³

C. Jenis-Jenis Kejahatan Jabatan

Jabatan publik adalah suatu jabatan yang diemban untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan publik atau umum, baik oleh pegawai negeri maupun penyelenggara negara lainnya dan pejabat yang dimaksudkan adalah pejabat publik atau pejabat umum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun negara disebut dengan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berada dalam lingkup lembaga eksekutif, sedangkan jabatan penyelenggara negara tidak hanya terbatas pada pejabat yang berasal dari lembaga eksekutif melainkan dapat pula berasal dari lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif, khususnya yang berasal dari kalangan politisi.²⁴

Jabatan publik sebagai suatu jabatan yang diselenggarakan oleh pejabat publik merupakan kelembagaan (institusi) yang diberikan kewenangannya menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisisnya bertitik tolak dari 2 (dua) aspek yakni aspek pertama, jabatan publik pada lingkungan lembaga eksekutif, dan jabatan publik di lingkungan penyelenggara negara. Jabatan publik di lingkungan Aparatur Sipil

²³Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, h. 4.

²⁴Krisdianto Pranoto, *Perbuatan Suap Terhadap Pejabat Publik dan Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Lex Administratum, Vol. III/No. 8/Okt/2015, Fakultas Hukum Unsrat, h. 5.

Negara (ASN) pada dasarnya ditujukan atau dimaksudkan pada jabatan publik dalam lingkungan lembaga eksekutif, sedangkan jabatan publik dilingkungan penyelenggara negara sebagai aspek kedua, adalah jabatan publik yang lebih luas daripada jabatan public pada Aparatur Sipil Negara, oleh karena pejabatnya dapat saja berasal dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif.²⁵

Gratifikasi yang dianggap suap, sebagaimana korupsi pada umumnya, dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang dari para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemberian gratifikasi sendiri telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat legal, maupun yang ilegal. Pemberian ini dikenal pula dengan sebutan pemberian upeti, uang lelah, maupun pemberian sebagai bentuk terima kasih, dan terus berkembang hingga menjadi bentuk pemberian yang ilegal. Pemberian gratifikasi atau bahkan suap sendiri mengandung ambiguitas. Pertanyaannya, kapan suatu pemberian dianggap gratifikasi ilegal atau suap, dan kapan tidak? Hal ini akan sangat tergantung dengan kondisi negara, konteks kultural, bahkan periodisasi sejarah.²⁶

Dalam banyak perkara, pemberian gratifikasi menjadi sebuah pintu masuk untuk meloloskan kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, dan oleh karenanya perlu diatur tentang pemberian gratifikasi ilegal kepada penyelenggara Negara dan pegawai negeri. Hal ini berkaitan erat dengan

²⁵Krisdianto Pranoto, *Perbuatan Suap Terhadap Pejabat Publik dan Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Lex Administratum, Vol. III/No. 8/Okt/2015, Fakultas Hukum Unsrat, h. 5.

²⁶Lalola Easter, Dkk, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor* (Jakarta: Policy Paper Indonesia Corruption Watch, 2014), h. 10.

kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.²⁷

Pada dasarnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS). Penjelasan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan secara jelas tentang larangan bagi pegawai negeri untuk menerima pemberian yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kewajibannya.²⁸

Sebetulnya pengertian kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pknun pegawai negeri tidak ada definisinya di dalam KUHP, namun kejahatan jabatan tersebut diatur dalam BAB XXVIII dari Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Meskipun pengertian kejahatan tidak diatur dalam KUHP tetapi di dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 (yang sejak tanggal 5 juli 1959 tidak berlaku lagi) dalam Pasal 106 dapat ditemui pengertian kejahatan jabatan, yakni:

“presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ketua, wakil ketua dan anggota dewan pengawas keuangan, presiden bank sirkulasi dan juga pegawai-pegawai anggota-anggota majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dengan tingkat pertama dan tertinggi juga oleh mahkamah agung, pun sudah mereka berhenti berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-

²⁷Lalola Easter, Dkk, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, h. 11.

²⁸Lalola Easter, Dkk, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, h. 33.

undang an yang dilakukan dalam masa pekerjaannya kecuali ditetapkan lain dengan undang-undang”²⁹.

Menurut Pasal 106 undang-undang dasar sementara Tahun 1950 tersebut kejahatan dan pelanggaran jabatan yang dilakukan mereka, yang dimaksud dengan kejahatan dalam Pasal 106 undang-undang dasar Tahun 1950 adalah salah satu dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 413 sampai dengan 437 KUHP. Lain daripada itu di dalam KUHP pasal 7 juga disinggung mengenai kejahatan jabatan yang berbunyi “aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap pejabat (pegawai negeri) di luar Indonesia yang melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut dalam Bab XXVIII buku kedua KUHP.

Pasal 7 KUHP tersebut mengatur mengenai kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat Indonesia di luar negeri, termasuk pegawai negeri/pejabat Indonesia juga orang asing yang bekerja ddi perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri, di samping itu juga banyak pegawai negeri/pejabat Indonesia yang karena jabatan/tugasnya banyakberada di luar negeri.

Setelah meninjau dua pasal tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbutan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII buku kedua KUHP.

Untuk bahan bandingan perlu pula penuls kemukakan sebuah pasal dari KUHP yang berada di luar Bab XXVIII yaitu pasal 209 yang berbunyi: “ diancam dengan hukuman palling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah:

²⁹Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil* (Cet.II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 55.

- 1) Barangsiapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2) Barangsiapa memberi sesuatu kepada seseorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal ini memiliki unsur-unsur daya upaya yang memberi atau menjanjikan dan unsur jabatan.³⁰ Kejahatan jabatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan (status) pegawai negeri untuk pegawai negeri di sini adalah mutlak, hal mana juga sama dengan pelanggaran jabatan. Oleh karena itu kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan merupakan segi-segi kepidanaan dalam kepegawaian Indonesia.³¹

Definisi kejahatan jabatan hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Selanjutnya menurut pandangan pembentuk Undang-Undang kejahatan jabatan dapat ditunjukkan kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum merupakan kepentingan hukum dari masyarakat maupun kepentingan hukum dari individu-individu. Suatu cirri yang bersifat umum dari kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara.³²

Menurut pembentuk Undang-Undang yang dapat disebut sebagai kejahatan jabatan hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Selanjutnya menurut pandangan pembentuk undang-undang kejahatan dapat ditunjukkan

³⁰Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 56

³¹Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 57

³²Yopie Morya Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil*, h. 82.

kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum merupakan kepentingan hukum dari masyarakat maupun kepentingan umum dari individu-individu. Salah satu ciri sifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara.

Berbagai kejahatan jabatan pegawai negeri sipil diatur dalam KUHP Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Perumusannya terdapat dalam Pasal 415 KUHP.
2. Pengacauan Administrasi/pembukuan oleh pegawai negeri.
3. Penggelapan perusahaan atau pemalsuan surat-surat oleh pegawai negeri. Mengenai peraturannya diatur dalam pasal 417 KUHP.
4. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji (suap).³³
5. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima atau janji.³⁴
6. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji.
7. Penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri atau pejabat.³⁵
8. Pemerasan oleh pegawai negeri.
9. Kejahatan jabatan oleh pegawai negeri atau pejabat yang ikut serta dengan pemborongan, penyerahan dan persewaan yang pengawasan dan pengurusannya diarahkan kepadanya.³⁶

³³Viktor m. Sitomorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil (Cet.II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 59

³⁴Viktor m. Sitomorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, h. 60.

³⁵Viktor m. Sitomorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, h. 61.

³⁶Viktor m. Sitomorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, h. 62.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN HUKUM ISLAM

A. *Pengertian Kejahatan dalam Islam*

Dalam hukum Islam, istilah hukum pidana disebut dengan *fiqih jinayah*. *Jinayah* berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya. Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman di atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa *fiqih jinayah* adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal), yang dimaksud tindakan kriminal adalah perbuatan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.¹

Pengertian tersebut sejalan dengan perspektif hukum konvensional tentang hukum pidana yakni hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana atau dengan kata lain serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Ada dua kata yang sama-sama memiliki pengertian melawan hukum dalam pengertian tersebut, yakni kata "delik" dan "tindak pidana". Delik atau bahasa latinnya *delictum* berarti tindak pidana atau sering juga

¹Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 111.

dipergunakan istilah lainnya yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah dalam hukum pidana Belanda.

Istilah *strafbaar feit* juga diadopsi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP Indonesia) yang diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan hukuman bagi orang yang melanggarnya”. Kenyataan ini wajar mengingat KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht/WVS* Belanda. Jadi, beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk menunjuk pada perbuatan melanggar hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan *strafbaar feit*. Bahkan, untuk Negara-negara yang menganut system *anglo saxon* sering menggunakan istilah *offense* atau *criminal act*.

Selain ada istilah *delictum* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvensional, di dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *jinayah* dan *jarimah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai kata *jinayah* untuk perbuatan yang terkait dengan jiwa seperti membunuh, melukai, memukul dan menggugurkan kandungan. Sedangkan kata *jarimah* di pergunakan untuk menyebut selain pelanggaran terhadap jiwa. Sebenarnya baik kata *delictum* dan *strafbaar feit* maupun *jinayah* dan *jarimah* memiliki benang merah yang kuat, yakni bermakna tindak kejahatan.²

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan

²Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h. 112

kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.³

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah swt yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setaip manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah swt sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah swt. Perintah Allah swt dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴ *Fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian *fiqih* dan *jinayah*. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqih jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.⁵

Diantara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisash*, dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah

³Dede rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. ix

bahwa “hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah swt”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah swt semat-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah swt yang lebih dominan.

Oleh karena itu hukuman *had* merupakan hukuman hak Allah swt maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.⁶

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu ;

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qadzaf*
- 3) *Jarimah syurb al-khamr*
- 4) *Jarimah pencurian*
- 5) *Jarimah hirabah*
- 6) *Jarimah riddah, dan*
- 7) *Jarimah pemberontakan (Al-Baquy).*

2. *Jarimah qisash dan diyat*

Jarimah qishash dan diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah

⁶Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. x

bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah swt (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah *qishash* dan *diyat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, apabila diperluas jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja⁷

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah *ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa "*ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'".

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.

⁷Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. xi

- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).⁸

B. *Kejahatan Jabatan dalam Islam*

Tindak pidana berarti perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Jadi tindak pidana korupsi berarti upaya mengambil harta secara sewenang-wenang yang dilakukan pejabat atau orang tertentu dan dianggap melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁹

Hanya saja, karena jumlah dana publik begitu besar, sehingga implikasi yang ditimbulkan dari korupsi keuangan negara ini menjadi sangat besar. Bahkan seorang pejabat negara bisa melakukan korupsi sampai milyaran rupiah.

Korupsi memiliki 2 unsur utama yaitu pertama: Perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Kedua: Setiap perbuatan yang dilakukan pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara, daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung, membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.¹⁰

Adapun korupsi mengandung banyak unsur kejahatan yaitu:

1. Kecurangan dan manipulasi karena mengandung unsur penggelapan. Si koruptor melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya pembelian tiket pesawat dinas dilaporkan sebanyak 10 juta, padahal

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. xii

⁹M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. *Journal Ihya' 'Ulum al-Din*. Vol 18 no 2 (2016), h. 162.

¹⁰M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. *Journal Ihya' 'Ulum al-Din*. Vol 18 no 2 (2016), h. 163.

realitanya hanya 5 juta. Maka dalam hal ini telah berbuat curang karena mengambil uang 5 juta untuk dirinya.

2. Kedzaliman karena merugikan rakyat yang telah membayar pajak. Dzalim adalah berbuat sewenang-wenang. Dosanya sangat besar. Dan membawa dampak yang berbahaya baik di dunia dan akhirat. Rakyat kecil yang tidak berkuasa didzalimi oleh penguasa, pejabat dan petugas negara karena haknya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum terhalangi karena dana pembiayaan untuk sarana tersebut dikorupsi.
3. Khianat karena melanggar dan menyalahi sumpah jabatan. Seorang pejabat atau petugas negara telah disumpah dengan kitab suci bahwa mereka akan bertanggung jawab dan melaksanakan tugas yang diembankan dengan penuh amanah. Tetapi dalam perjalanannya tidak menjalankan sumpah itu dan berbuat menyimpang.
4. Tindakan kolusi dengan memanfaatkan fasilitas negara. Modusnya yaitu bekerjasama dengan pihak tertentu untuk menyelewengkan uang negara. Atau juga menerima suap dari pihak tertentu. Atau juga dalam pengangkatan pegawai negeri. Tentu saja, sikap kolusi ini sangat merugikan negara. Karena calon pegawai yang semestinya direkrut dari hasil seleksi yang adil dan transparan ternyata diselewengkan karena menerima titipan dari kolega.¹¹

Dalam bahasa Arab, bahasa yang dipakai sumber utama Islam, korupsi disebut sebagai *risywah* (suap), *fasad* (kerusakan), atau *ifsad* (merusak), *ta'affun* (membususk), dan *ghulul* (berkhianat) meskipun kata yang dipakai dalam bahasa Arab sekarang adalah *fasad*. Yang dimaksud dengan korupsi adalah korupsi dalam tiga tingkat, yaitu tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of*

¹¹M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Journal Ihya' 'Ulum al-Din. Vol 18 no 2 (2016), h. 163-164.

trust), sebagai tindak korupsi yang paling rendah; tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), walaupun tidak mendapatkan keuntungan material; sebagai tindak korupsi tingkat menengah, dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya (*material benefit*), baik untuk diri sendiri, keluarga, sebagai tindak korupsi yang paling buruk yang telah melewati korupsi tingkat pertama dan kedua.¹²

Selain itu, nilai-nilai normatif antikorupsi dalam Islam dilihat dari keharusan pejabat publik yang diangkat memiliki sifat jujur (*shidiq*) dan akuntabel (*amanah*). Sifat jujur merupakan sifat yang harus dimiliki oleh para Nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad saw, pemimpin atau pejabat publik yang dalam batas-batas tertentu melanjutkan tugas kenabian (memelihara moralitas dan kepentingan duniawi masyarakat), maka kejujuran harus juga dimiliki oleh mereka. Jika seorang pemimpin public melakukan kebohongan berarti ia akan meminta bawahannya untuk melakukan kebohongan berarti meminta bawahannya untuk melakukan kebohongan. Berdasarkan perspektif ini, korupsi yang berawal dari keharusan antara lain melakukan tindak kebohongan dalam bukti dengan *mark up* atau memberikan laporan palsu, maka akan melahirkan kebohongan yang dilakukan bersama.¹³

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada di muka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din* al-

¹²Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* (Cet. I; Jakarta: Kencana 2013), h. 284-285.

¹³Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, h. 290.

Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertical dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁴ Allah swt firman-Nya dalam Q.S An-Nisa/4:29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁴Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015. Fakultas Hukum Unsrat, Manado. h. 74

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Sedangkan dalam Hadits Nabi Muhammad saw yang memerintahkan untuk tidak menerima suap dalam masa jabatan, yaitu,

اللَّهُ اللَّهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ
اللَّهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amru ia berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 107-108.

¹⁶Hadits 3580. Muhammad Nashidurrin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Cet I; Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1219 H/1998 M). Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadis-hais Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 630.

BAB IV

KETENTUAN MENGENAI KEJAHATAN JABATAN SEORANG

PEJABAT MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Perspektif Hukum Nasional mengenai Kejahatan yang Dilakukan dalam Masa Jabatan

Menurut pembentuk Undang-Undang yang dapat disebut sebagai kejahatan jabatan hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Selanjutnya menurut pandangan pembentuk undang-undang kejahatan dapat ditujukan kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum merupakan kepentingan hukum dari masyarakat maupun kepentingan umum dari individu-individu. Salah satu ciri sifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari Negara.¹ Berbagai kejahatan jabatan pegawai negeri sipil diatur dalam KUHP Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 413. Penolakan untuk menggunakan kekuasaan yang berada di bawah perintahnya atas permintaan yang sah dari kekuasaan sipil yang berwenang.²

Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada pasal ini adalah:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- b. Unsur-unsur objektif:

- 1) Komandan angkatan bersenjata

¹Yopie Morya Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil* (Cet. I; Bandung: CV Keni Media, 2013), h. 82.

²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, Polteia, 1995), h. 281.

- 2) Menolak
 - 3) Mengabaikan
 - 4) Permintaan yang sah menurut undang-undang
 - 5) Kekuasaan sipil yang berwenang
 - 6) Menggunakan kekuatan yang berada di bawah perintahnya.³
2. Pasal 414. Pegawai negeri yang meminta bantuan kekuasaan bersenjata untuk melawan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, perintah yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan umum dan putusan atau perintah pengadilan.⁴
- Adapun unsur-unsur pada pasal tersebut, yaitu:
- a. Unsur subjektif: dengan sengaja,
 - b. Unsur objektif:
 - 1) Seorang pegawai,
 - 2) Meminta bantuan,
 - 3) Kekuatan bersenjata,
 - 4) Untuk melawan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang sah menurut undang-undang, perintah-perintah yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan umum, dan putusan-putusan atau surat-surat perintah pengadilan.⁵

³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 57.

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 282.

⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 69-70.

3. Pasal 415. Pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang berada di bawah kekuasaannya digelapkan atau diambil oleh orang lain.⁶

Unsur-unsur dari pasal ini dapat disebutkan :

- a. Pembuatnya harus berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau sementara waktu.
 - b. Dengan sengaja.
 - c. Menggelapkan uang atau surat-surat berharga.
 - d. Yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat-surat berharga tersebut diambil, digelapkan orang lain atau menolong sebagai pembantu, mengenai penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat seperti tersebut di atas, akan kami bedakan dengan penggelapan biasa yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.⁷
4. Pasal 416. Pegawai negeri yang sengaja membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau register-register yang terutama digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi.⁸

Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah :

- a. Pelakunya/pembuatnya harus mempunyai status pegawai negeri sipil/pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 282.

⁷Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil (Cet.II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)*, h. 57

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 283.

- c. Membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.⁹

Pasal ini khusus mengancam tindak pidana pemalsuan hanya buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha, misalnya buku agenda, buku kas, buku kejahatan dan pelanggaran serta lain-lainnya.¹⁰

5. Pasal 417. Pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai dan lain-lain, benda-benda yang diperuntukkan membutikan kebenaran atau diperuntukkan sebagai bukti bagi kekuasaan yang berwenang.¹¹

Pasal ini memuat unsur-unsur antara lain:

- a. Pelakunya atau pembuatnya seorang yang mempunyai status sebagai pegawai negeri atau pejabat atau seseorang yang dianggap sebagai pegawai negeri atau pejabat.
 - b. Dengan sengaja.
 - c. Menggelapkan, menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai.
 - d. Barang-barang guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang.
 - e. Akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasanya jabatannya.¹²
6. Pasal 418. Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji, yang diketahui atau secara patut dapat diduga bahwa pemberian atau janji

⁹Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 59

¹⁰Yopie Morya Immanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil*, h. 82.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 283.

¹²Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 59

itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki karena jabatannya.¹³

Pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Yang menerima atau janji adalah pegawai negeri atau pejabat.
 - b. Yang diketahui atau patut diduga itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
 - c. Menurut orang yang memberi ada hubungannya dengan jabatannya.¹⁴
7. Pasal 419. Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahui bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya untuk mengerakkan dirinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau telah diberikan kepadanya karena ia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.¹⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 419 angka 1 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: yang ia ketahui
- b. Unsur subjektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Menerima suatu pemberian atau janji
 - 3) Diberikan untuk mengerakkan dirinya melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya secara bertentangan dengan kewajibannya.¹⁶

¹³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 284.

¹⁴Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 59

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 284-285.

¹⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 121

Unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur objektif: yang ia ketahui
 - b. Unsur subjektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Menerima suatu pemberian
 - 3) Diberikan kepadanya sebagai akibat atau berkenaan dengan yang telah ia lakukan atau alpaikan di dalam menjalankan tugas jabatannya secara bertentangan dengan kewajibannya.¹⁷
8. Pasal 420. Hakim yang menerima pemberian atau janji yang ia ketahui bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya untuk mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.¹⁸

Adapun unsur pasal ini terdiri dari:

- a. 1). Hakim
 - 2) Menerima hadiah atau janji
 - 3) Padahal diketahui bahwa itu, diberikan, dan
 - 4) Untuk mempengaruhi putusan perkara, dan
- b. 1) Penasihat hukum,
 - 2) Menerima hadiah atau janji
 - 3) Padahal diketahui bahwa itu diberikan, dan
 - 4) Untuk mempengaruhi nasihat terhadap perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.¹⁹

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 122

¹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 285-286.

¹⁹Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 61

9. Pasal 421. Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.²⁰

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 421 KUHP itu hanya terdiri atas unsur-unsur objektif masing-masing, yakni:

- a. Seorang pegawai negeri
- b. Dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.²¹

10. Pasal 422. Pegawai negeri yang dalam perkara pidana memakai cara-cara yang sifatnya memaksa untuk mendapatkan pengakuan atau agar orang mau memberikan keterangan.²²

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 422 KUHP hanya terdiri atas unsur objektif, masing-masing yakni:

- a. Seorang pegawai negeri
- b. Dalam suatu perkara pidana
- c. Memakai cara-cara yang sifatnya memaksa untuk:
 - 1) Mendapatkan suatu pengakuan atau
 - 2) Menggerakkan orang memberikan suatu keterangan²³

11. Pasal 423. Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu untuk melakukan suatu

²⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 286.

²¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 135

²²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 286.

²³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 141

pembayaran atau telah melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi.²⁴

Adapun unsur-unsur pasal ini adalah:

- a. Pegawai negeri/pejabat
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum.
- c. Menyalahgunakan kekuasaan.
- d. Dengan memaksa seseorang.
- e. Untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.²⁵

12. Pasal 424. Pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kekuasaannya menguasai tanah Negara di atasnya terdapat hak pakai Indonesia.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 424 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif:
 - 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 - 2) Melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya menguasai
 - 3) Tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia.²⁷

²⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 287.

²⁵Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 62

²⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 287.

13. Pasal 425. Pemerasan oleh Pegawai Negeri Sipil.²⁸

Adapun unsur-unsurnya dapat kami sebutkan:

- a. 1) pegawai negeri atau pejabat.
 - 2) Pada waktu menjalankan tugasnya, dan
 - 3) Meminta, menerima atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lain, atau kepada kas umum, padahal tidak demikian halnya.
- b. 1) seorang pegawai negeri/pejabat.
 - 2) Pada waktu menjalankan tugasnya, dan
 - 3) Meminta, atau menerima, pekerjaan atau penyerahan,
 - 4) Seolah-olah merupakan utang kepadanya
- c. 1) seorang pegawai negeri/pejabat.
 - 2) Pada waktu menjalankan tugasnya,
 - 3) Seolah-olah sesuai dengan peraturan yang bersangkutan,
 - 4) Menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-pakai Indonesia, dan
 - 5) Merugikan yang berhak.²⁹

14. Pasal 426. Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang tahanan, yang dengan sengaja membiarkan orang tahanan itu melarikan diri,

²⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 150

²⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 287-288.

²⁹Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 62

membebaskan atau memberikan bantuannya pada waktu orang itu dibebaskan atau melarikan diri.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP terdiri atas:

- a. Unsur objektif: dengan sengaja
- b. Unsur subjektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan
 - 3) Membiarkan melarikan diri atau membebaskan
 - 4) Memberikan bantuannya pada waktu orang itu dibebaskan atau membebaskan dirinya sendiri.³¹

15. Pasal 427. Pegawai negeri yang ditugaskan untuk menyelidiki tindak pidana, yang dengan sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menunjukkan adanya perampas kemerdekaan yang sifatnya melawan hukum atau dengan sengaja tidak memberitahukan kepada atasannya dengan segera.³²

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 427 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur objektif: dengan sengaja
- b. Unsur subjektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri yang ditugaskan untuk menyelidiki tindak-tindak pidana.

³⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 288.

³¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 161

³²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 289.

- 2) Tidak memenuhi permintaan untuk menunjukkan adanya suatu perampasan kemerdekaan yang bersifat melawan hukum.
- 3) Tidak segera memberitahukan hal tersebut kepada kekuasaan yang lebih tinggi.³³

Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 427 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif:
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Mengetahui bahwa seseorang telah dirampas kemerdekaannya dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Dalam menjalankan tugas jabatannya
 - 3) Mengalpakkan dengan segera memberitahukan seorang pegawai negeri yang ditugaskan untuk menyelidiki tindak-tindak pidana tentang hal tersebut³⁴.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 427 ayat (2) KUHP terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: karena salahnya
- b. Unsur objektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Sesuatu kealpaan seperti yang diatur dalam pasal ini.³⁵

³³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 172

³⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 185

³⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 188

16. Pasal 428. Kepala lembaga untuk menahan orang-orang terpidana, untuk menahan orang-orang yang dikenakan penahanan atau penyanderaan atau kepala lembaga pendidikan Negara atau rumah sakit jiwa yang menolak permintaan yang sah untuk menunjukkan adanya seseorang yang dirawat dalam lembaganya.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 428 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing sebagai berikut:

- a. Kepala dari suatu lembaga yang diperuntukkan menutup orang-orang terpidana
- b. Kepala dari suatu lembaga yang diperuntukkan menutup orang-orang yang dikenakan penahanan sementara atau orang-orang yang disandera
- c. Kepala dari suatu lembaga pendidikan Negara.
- d. Kepala dari sebuah rumah sakit jiwa.
- e. Menolak memenuhi suatu permintaan yang diajukan menurut ketentuan undang-undang untuk menunjukkan seseorang yang telah dimasukkan ke dalam lembaga.
- f. Menolak memenuhi suatu permintaan yang diajukan menurut ketentuan undang-undang untuk memperlihatkan daftar dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam lembaga atau untuk memperlihatkan akta yang sesuai dengan ketentuan dari suatu peraturan umum diharuskan memuat pendaftaran seperti itu.³⁷

17. Pasal 429. Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan

³⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 289.

³⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 192

umum, memasuki sebuah tempat kediaman atau sebuah ruangan tertutup atau halaman yang dipakai oleh orang lain, atau berada di sana, dan tidak meninggalkan tempat tersebut setelah diminta oleh orang yang berhak atas nama orang yang berhak.³⁸

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 429 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: melawan hukum
- b. Unsur objektif:
 - 1) Seorang pegawai negeri
 - 2) Dengan melampaui batas kewenangannya
 - 3) Tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum.
 - 4) Memasuki bertentangan dengan kemauan orang tersebut.
 - 5) Sebuah tempat kediaman atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain.
 - 6) Berada di sana dan tidak meninggalkan tempat tersebut setelah diminta untuk berbuat demikian oleh atau atas nama yang berhak.³⁹

18. Pasal 430. Pegawai negeri yang melampaui batas kewenangannya menyuruh memperlihatkan kepadanya atau menyita sepucuk surat, kartu posm tulisan atau paket yang dipercayakan kepada sesuatu embaga pengangkutan umum, atau sebuah berita kawat yang erada di tangan seorang pegawai kantor telegraf atau lain-lain orang yang ditugaskan melayani suatu pesawat telegraf yang dipakai untuk kepentingan umum.⁴⁰

³⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 290.

³⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 215

⁴⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 290-291.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 430 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif saja, masing-masing sebagai berikut:

- a. Seorang pegawai negeri
- b. Dengan melampaui batas kewenangannya
- c. Menyuruh memperlihatkan atau menyita
- d. Sepucuk surat, kartupos, suatu tulisan atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan umum
- e. Suatu berita kawat yang berada di tangan seorang pegawai kantor telegraf atau orang-orang lain yang ditugaskan melayani pesawat telegraf, yang dipakai untuk kepentingan umum.⁴¹

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 430 ayat (2) KUHP itu juga hanya terdiri dari unsur objektif saja, masing-masing sebagai berikut:

- a. Seorang pegawai negeri
- b. Dengan melampaui batas kewenangannya
- c. Meminta keterangan mengenai pembicaraan telepon yang dilakukan melalui lembaga tersebut.
- d. Seorang pegawai kantor telpon atau orang-orang lain yang ditugaskan melayani pesawat penyambung pembicaraan telepon yang dipakai untuk kepentingan umum.⁴²

19. Pasal 431. Pegawai negeri dari suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membuka sebuah surat yang

⁴¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 232

⁴²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 240

dipercayakan pengirimannya kepada lembaga seperti itu atau membaca isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain.⁴³

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 431 KUHP terdiri atas:

a. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dengan melawan hukum

b. Unsur-unsur objektif:

- 1) Seorang pegawai negeri dari suatu lembaga umum yang bertugas dengan pengangkutan.
- 2) Sebuah surat, benda yang terbungkus atau tertutup atau suatu paket yang dipercayakan pengirimannya kepada suatu lembaga seperti itu.
- 3) Membuka, membaca atau berusaha mengetahui isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain.⁴⁴

20. Pasal 432. Pegawai negeri dari suatu lembaga yang bertugas dengan pengangkutan umum atau pengiriman, yang dengan sengaja menyerahkan kepada orang lain daripada orang yang berhak untuk menerimanya, menghancurkan dan lain-lain, sepucuk surat, kartu pos, dan lain-lain yang dipercayakan pengirimannya kepada lembaga umum semacam itu.⁴⁵

Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur objektif, yaitu

⁴³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 291.

⁴⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 242

⁴⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 291-292.

- 1) Seorang pegawai negeri dari suatu lembaga umum yang ditugaskan dengan pengangkutan,
- 2) Menyerahkan kepada orang lain daripada orang yang berhak,
- 3) Menghancurkan,
- 4) Menghilangkan,
- 5) Menguasai bagi dirinya sendiri,
- 6) Mengubah isinya,
- 7) Menguasai bagi dirinya sendiri sesuatu benda yang terdapat di dalamnya,
- 8) Sepucuk surat, surat karti pos, benda atau paket yang dipercayakan pengangkutannya atau pengirimannya kepada suatu lembaga.⁴⁶

21. Pasal 433. Pegawai negeri pada kantor telegraf atau telepon atau orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan atau melayani pesawat telegraf atau pesawat penyambung pembicaraan telpon, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain isi berita kawat atau telepon, yang dipercayakan pengirimannya kepada lembaga-lembaga tersebut.⁴⁷

Tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 433 angka 1 KUHP itu terdiri atas:

- a. Unsur subjektif:
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dengan melawan hukum
- b. Unsur objektif:

⁴⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 255-256.

⁴⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 292.

- 1) Pegawai negeri pada kantor telegraf atau telepon atau seseorang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawakan terhadap atau untuk melayani suatu pesawat telegraf atau pesawat penyambung pembicaraan telepon yang dipakai untuk kepentingan umum.
- 2) Memberitahukan isinya kepada orang lain.
- 3) Suatu berita yang dipercayakan pengirimannya kepada kantor telegraf, kantor telepon atau kepala lembaga seperti itu.
- 4) Membuka, membaca isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain.
- 5) Suatu berita telegram atau telepon.⁴⁸

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 433 angka 2 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 - 1) Pegawai negeri pada kantor telegraf atau telepon atau seseorang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap atau seseorang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawakan terhadap atau untuk melayani suatu pesawat telegraf atau pegawai penyambung pembicaraan telepon yang dipakai untuk kepentingan umum.
 - 2) Menyerahkan kepada orang lain daripada orang-orang yang berhak menerimanya, menghancurkan, menghilangkan, mengusai bagi dirinya sendiri atau mengubah isinya.
 - 3) Suatu berita atau suatu berita melalui telegram atau telepon yang dipercayakan pengirimannya kepada kantor telegraf, kantor telepon atau kepada lembaga seperti itu.⁴⁹

⁴⁸P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 270.

22. Pasal 434. Pegawai negeri pada sesuatu lembaga umum di bidang pengangkutan umum, telegraf atau telepon atau seseorang lainnya yang dimaksud dalam Pasal 433 KUHP, yang dengan sengaja membiarkan melakukan tindak-tindak pidana diatur dalam pasal 431 sampai dengan Pasal 433 KUHP atau memberikan bantuannya kepada orang tersebut.⁵⁰

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 434 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
 - 1) Pegawai negeri dari sesuatu lembaga umum di bidang pengangkutan, telegraf atau telepon, atau seseorang lainnya seperti yang dimaksudkan dalam pasal 433 KUHP.
 - 2) Atau membiarkan orang lain melakukan salah satu tindak pidanaseperti yang diatur dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 433 KUHP.
 - 3) Memberikan bantuannya kepada orang lain itu untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut di atas.⁵¹

23. Pasal 435. Pegawai negeri yang dengan sengaja turut serta baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada perombongan, pengadaan barang atau penyelewaaan.⁵²

Adapun unsur-unsur pasal ini sebagai berikut:

- a. Seorang pegawai negeri/pejabat.

⁴⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 276.

⁵⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 293.

⁵¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, h. 281

⁵²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 293.

- b. Dengan langsung ataupun tidak langsung.
- c. Sengaja turut serta.
- d. Dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan (*verpach-tingen*).
- e. Untuk seluruhnya atau sebagian dia ditugasi mengurus atau mengawasinya.⁵³

B. Ketentuan Perspektif Hukum Islam mengenai Kejahatan yang Dilakukan dalam Masa Jabatan

Baik di dalam hukum Islam maupun hukum konvensional ternyata terdapat kesamaan meskipun tidak serupa tentang ruang lingkup dan pembagian hukum pidana. Yakni menyangkut; subyek (pelaku kejahatan), obyek (perbuatan perbuatan yang dilarang), dan sanksi (hukuman yang diterapkan). Tentang subyek (pelaku kejahatan) bahasanya lebih ditekankan kepada kondisi dan keadaan pelaku kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman atau sering juga disebut pertanggungjawaban pidana. Seperti ungkapan ungkapan Hanafi, bahwa “tentang orang yang melanggar larangan, sering juga disebut dalam literature hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.”⁵⁴

Menjadi pegawai negeri sampai hari masih tetap menjadi impian masyarakat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya banyak orang gagal menjadi pegawai negeri. Kegagalan tersebut bisa karena faktor internal dirinya, tetapi bisa juga karena faktor eksternal. Hal ini kemudian menjadi salah satu pengaruh bagi lahirnya praktik suap dalam penerimaan PNS. Dalam pandangan NU, penyuapan jelas merupakan praktik yang hukumnya haram. Ini adalah ketetapan yang tidak bisa disangkal. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah bagaimana hukum

⁵³Viktor m. Sitomorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, h. 63

⁵⁴Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 114.

gaji seseorang pegawai negeri yang pada saat masuk menjadi pegawai dengan cara menyuap?..⁵⁵

Dalam menanggapi hal ini, ternyata di tubuh NU sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama, status hukum gaji tersebut adalah haram. Pendapat ini mengandaikan adanya hubungan sebab-akibat antara pengangkatannya sebagai pegawai negeri dengan gajinya. Logika mudahnya adalah karena pengangkatannya sebagai pegawai negeri melalui cara yang diharamkan (suap), maka gaji yang diterimanya juga haram. Sebab, yang mengikuti hukumnya mengikuti apa yang diikuti (*at-tabi' tabi'un li hukm al-matbu'*). Pendapat kedua menyatakan bahwa gajinya adalah halal, karena tidak ada keterkaitan antara suap dan gaji. Pendapat ini mengandaikan bahwa suap adalah satu hal, sedang gaji adalah hal yang lain..⁵⁶

Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif, dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah dilakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat..⁵⁷

Terdapat banyak ungkapan yang dapat dipakai untuk menggambarkan pengertian korupsi, meskipun tidak seutuhnya benar. Akan tetapi tidak terlalu jauh dari hakikat dan pengertian korupsi itu sendiri. Ada sebagian yang menggunakan

⁵⁵Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad NU Melawan Korupsi* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, 2016), h. 136.

⁵⁶Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad NU Melawan Korupsi*, h. 137.

⁵⁷Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 154-155.

istilah “*akhdul amwal bil bathil*” (memakan harta orang lain dengan cara yang bathil), sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur’an dalam Q.S al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁵⁸

Korupsi secara definitif juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama, misalnya, menganalogikan korupsi dengan *al-ghulul*, sebuah istilah yang diambil dari Q.S Ali Imran/3:161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi”.⁵⁹

Yang dimaksud dengan *ghulul* dalam ayat tersebut ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi, pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dapat dipahami bahwa pengertian dari ayat ini adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”. Namun, dalam wilayah perkembangan kajian fiqh (Islam), khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer, istilah ini didefinisikan setara dengan korupsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun

⁵⁸Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 36.

⁵⁹Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 90.

2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan *al-ghulul* (korupsi), *al-risywah* (suap-menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa korupsi dan praktik suap “sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi para pejabat, sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya.⁶⁰

Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang dikemukakan tersebut diketahui bahwa terdapat tiga unsur korupsi; yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, mengambil harta orang lain dengan jalan tidak sah (penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan), dan melawan hukuman.⁶¹

Secara normatif-tekstual, tindak pidana korupsi yang dirujuk dari istilah *al-ghulul* jelas keharamannya. Dari segi hukum undang-undang, seseorang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria; Pertama, melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Apabila seorang pejabat diperbolehkan menerima hadiah atau pemberian, pasti akan merajalela kasus-kasus hadiah yang sangat mirip dengan *risywah*, penyuapan, atau penyogokan. Adapun pemberian hadiah atau sedekah yang

⁶⁰Muhammad Azhar (Ed.), *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi, 2013), h. 70

⁶¹Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2012), h. 82.

diberikan kepada orang bukan pejabat, lebih-lebih jika termasuk kelompok duaafa maka hadiah dan pemberiaannya sangat baik dan dianjurkan agama.⁶²

Nabi Muhammad saw tidak menganggap *ghulul* sebagai suatu *jarimah* atau tindak pidana kriminal yang pelakunya akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana *jarimah hudud* dan *qisas*. Dalam menangani kasus-kasus penggelapan atau *ghulul*, Nabi Muhammad saw tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewangan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya.⁶³

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukuman *takzir* sebab keduanya tidak termasuk dalam rana qisas dan hudud. Dalam hal ini, sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Qur'an dan hadits), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada di tangan hakim.⁶⁴

⁶²H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Ed. I; Cet. I: Jakarta: Amzah, 2011), h. 86.

⁶³H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 87.

⁶⁴H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai kejahatan dalam jabatan pegawai negeri sipil diatur dalam KUHP Bab XXVIII – Pasal 413-435 KUHP Kejahatan Jabatan, yaitu:
 - a. Penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri berdasarkan jabatannya.
 - b. Pengacauan Administrasi/pembukuan oleh pegawai negeri.
 - c. Penggelapan perusahaan atau pemalsuan surat-surat oleh pegawai negeri.
 - d. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji (suap).
 - e. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima atau janji
 - f. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji.
 - g. Penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri atau pejabat.
 - h. Pemerasan oleh pegawai negeri
2. Ketentuan kejahatan dalam jabatan menurut hukum Islam yaitu dapat ditemukan dalam Q.S Ali Imran/3:161 kata *al-ghulul* ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi, pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dapat dipahami bahwa pengertian dari ayat tersebut adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”. Namun, dalam wilayah perkembangan kajian fiqh (Islam), khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer, istilah ini didefinisikan setara dengan korupsi. Majelis Ulama

Indonesia (MUI) pada tahun 2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan *al-ghulul* (korupsi), *al-risywah* (suap-menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa korupsi dan praktik suap “sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi para pejabat, sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya.

B. Implikasi Penelitian

Penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap jalannya pembangunan bangsa dan Negara, baik dalam lapangan materil maupun yang bersifat moril. Seperti dapat dibaca di Koran-koran, banyak tokoh masyarakat yang telah mensinyalir bahwa korupsi dan komersialisasi jabatan telah menjalar di segala bidang, dan dilakukan baik di kalangan atas maupun bawahan. Malahan pelakunya nampak begitu nekat seakan-akan tidak takut ditindak. Tetapi sukar untuk menemukan bukti-buktinya yang otentik karena dilakukan dengan cara-cara yang lihai sekali. Lebih-lebih mengingat kenyataan adanya tendensi hubungan erat antara atasan dan bawahan dalam menyalahgunakan jabatan itu., sehingga merupakan perbuatan kolektif. Kendati seorang pegawai negeri ketika akan memangku jabatannya telah mengangkat sumpah jabatan, namu dalam kenyataan sumpah jabatan ini tidak banyak menolong.

Diperlukan usaha untuk memberantas kesewenangan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pegawai negeri dan lain-lain orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, antara lain dengan memberitahukan kepada khalayak ramai, para penegak hukum, dan pegawai negeri tentang perilaku mana yang menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dan dapat membuat anggota keluarga mereka yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut dipidana dengan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun sampai seumur hidup.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dkk, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet: I; Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 2; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Alam, A. S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Astawa, I Gde. *Problematisa Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni. 2008.
- Azhar (Ed.), Muhammad. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi. 2013.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Bahan Ajaran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran. 1960.
- Fuad Noeh, Munawar. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Cet. I; Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet I; Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Kaligis, O.C. *Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Terpadu*. Bandung: Alumni Bandung. 2011.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Cet. I; Jakarta: Kencana 2013.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cet. I; Jakarta: Kencana. 2015.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2007.
- Lalola Easter, Dkk. *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*. Jakarta: Policy Paper Indonesia Corruption Watch. 2014.
- M. Situmorang, Victor. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2001.

- Manan bin H. Muhammad Sobari, Abdul. *Himpunan 69 Materi Kultum untuk Semua Momentum*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2012.
- Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim. *Jihad NU Melawan Korupsi*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU. 2016.
- Muda Harahap, Hakim. *Ayat-ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media. 2012.
- Morya Immanuel Patirol, Yopie. *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: CV Keni Media. 2013.
- Nashidurrid Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud*. Cet I; Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif. 1219 H/1998 M. Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadis-hais Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud, Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- M. Sitomorang, Viktor. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil* (Cet.II; Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurul Irfan, H. M. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Ed. I; Cet. I: Jakarta: Amzah. 2011.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Ed. 2; Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Riawan Tjandra, W. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2008.
- Rofi Usmani, Ahmad. *Para Pemimpin yang Menjaga Amanah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka. 2016.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1992.
- Saepuddin Jahar dkk, Asep. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentary Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polteia. 1995.
- Tim Redaksi. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Permata Press. 2009.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedomana Penlitian Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press. 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

RIWAYAT HIDUP



Sidiq Fiqi Raharjo, lahir di Ujung Pandang, 28 Mei 1993. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Aris Sumartono dan Ibu Tasmin Ekawati.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SDN 060 Pekkabata Polmas, kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2005-2012.

Penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2017. Selama menjalani perkuliahan penulis bergabung dalam Organisasi Hukum ILS (*Independent Law Student*) dan menjadi Ketua KPSDM priode 2014-2015, dan menjadi pengurus bagian Humas di Organisasi Hukum PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) priode 2015-2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R